

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan

1. Tinjauan Tentang Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepala Sekolah

Herabudin mengartikan kepala sekolah adalah “pejabat tertinggi di sekolah yang memegang peranan penting dalam perkembangan sekolah atau penanggung jawab utama secara struktural dan administratif di sekolah.”¹

Menurut Uhar Suhar Saputra, dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pendidikan” menyatakan, “kepala sekolah adalah pemimpin yang menjalankan perannya dalam memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ia berperan sebagai pemimpin pendidikan.”²

Sedangkan dalam bukunya Wahyosumidjo, yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Sekolah” menegaskan bahwa kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang di beri tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang

¹ Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 200.

² Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013), 147.

menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. Bahkan lebih jauh tersebut menyimpulkan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Beberapa diantara kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang sebagai orang memiliki harapan tinggi bagi para staff dan para siswa, kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka.³

Menurut Edward Sallis dalam bukunya "*Total Quality Management In Education*" di jelaskan bahwa Mutu terpadu merupakan sebuah gairah dan pandangan hidup bagi organisasi yang menerapkannya. Peters dan Austin pernah meneliti karakteristik tersebut dalam bukunya "*A Passion For Excellence*" yang di kutip oleh Edward Sallis, penelitian tersebut meyakinkan mereka bahwa yang menentukan mutu dalam sebuah institusi adalah kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa gaya kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan institusi pada revolusi mutu sebuah gaya yang mereka singkat dengan MBWA atau management by walking about (manajemen dengan melaksanakan). Keinginan untuk unggul tidak bisa dikomunikasikan dari balik meja. MBWA menekankan pentingnya kehadiran pemimpin dan pemahaman atau pandangan mereka terhadap karyawan dan proses institusi. Gaya kepemimpinan ini mementingkan komunikasi visi

³ Wahyosumidjo, *kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 81-83.

dan nilai-nilai institusi kepada pihak-pihak lain, serta berbaaur dengan para staf dan pelanggan.⁴

Dalam buku yang sama, Peter dan Austin memberi pertimbangan spesifik kepada kepemimpinan pendidikan dalam sebuah bab yang berjudul “*Excellence in School Leadership*”, anjuran mereka terhadap pentingnya pemimpin yang unggul dalam mencapai mutu merupakan pertimbangan yang penting. Mereka memandang bahwa pemimpin pendidikan membutuhkan perspektif-perspektif berikut ini:

1. Visi dan simbol-simbol. Kepala sekolah harus mengkomunikasikan nilai-nilai institusi kepada para staf, para pelajar dan kepada komunitas yang lebih luas.
2. MBWA adalah gaya kepemimpinan yang dibutuhkan bagi sebuah institusi.
3. Untuk para pelajar. Istilah ini sama dengan dekat dengan pelanggan dalam pendidikan, ini memastikan bahwa institusi memiliki fokus yang jelas terhadap pelanggan utamanya.
4. Otonomi, eksperimentasi dan antisipasi terhadap kegagalan. Pemimpin pendidikan harus melakukan inovasi diantara staf-stafnya dan bersiap-siap mengantisipasi kegagalan yang mengiringi inovasi tersebut.
5. Menciptakan rasa kekeluargaan, pemimpin harus menciptakan rasa kekeluargaan diantara para pelajar, orang tua, guru dan staf institusi.
6. Ketulusan, kesabaran, semangat, intensitas, dan antusiasme. Sifat-sifat tersebut merupakan mutu personal esensial yang dibutuhkan pemimpin lembaga pendidikan.⁵

⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education, Ter-Ahmad Ali Riyadi*, (Jogjakarta: Ircisod, 2010), 169.

⁵ *Ibid.*, 170-171.

b. Syarat-syarat Kepala Sekolah

Kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, antara lain:

- a) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
- b) Berpegang tujuan pada tujuan yang di capai
- c) Bersemangat
- d) Cakap didalam memberi bimbingan
- e) Cepat dan bijaksana didalam mengambil keputusan
- f) Jujur
- g) Cerdas
- h) Cakap didalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mencapainya.⁶

Didalam bukunya Daryanto yang berjudul administrasi pendidikan bahwa syarat kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah
2. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama disekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinya.
3. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sikap-sikap kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan
4. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinya
5. Mempunyai ide dan insiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.⁷

Jadi seorang pemimpin sekolah memenuhi semua persyaratan yang ada diatas, maka peningkatan mutu dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu

⁶ M Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 90.

⁷ Ibid., 92.

kepala sekolah harus dapat memahami, mendalami, dan penerapan beberapa konsep ilmu manajemen.

c. Tugas dan fungsi Kepala Sekolah

Menurut H.M Daryanto, dalam bukunya “Administrasi Pendidikan” bahwa: “Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga dan menjadi juru bicara kelompok.”⁸

Sedangkan menurut E. Mulyasa, dalam bukunya “KBK Konsep, Karakteristik dan Implementasi” bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah dituntut untuk mampu berperan ganda, baik sebagai *catalyst*, *solution givers*, *process helpers*, dan *resource linker*.

- a. *Catalys*, berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik,
- b. *Solution givers*, berperan mengingatkan tujuan akhir perubahan,
- c. *Proces helpers*, berperan membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait, dan

⁸ H,M Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 94.

d. *Resource linkers*, berperan menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan.⁹

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah, yaitu:

- a. Kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya, sehingga tidak terjadi diskriminasi, sebaliknya dapat diciptakan semangat kebersamaan diantara mereka yaitu guru, staf dan para siswa.¹⁰
- b. Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan tugas. Para guru, staf dan siswa suatu sekolah hendaknya selalu mendapatkan saran dan anjuran dari kepala sekolah, sehingga dengan saran tersebut selalu dapat memelihara bahkan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- c. Dalam mencapai tujuan setiap organisasi memerlukan dukungan ,dana, sarana dan sebagainya. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan oleh para guru, staf, dan siswa, baik berupa dana, peralatan, waktu, bahkan suasana yang mendukung.

⁹ E. Mulyasa, *KBK Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 181.

¹⁰ Wahyjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 101.

- d. Kepala sekolah berperan sebagai katalitator, dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Kepala sebagai pemimpin harus dapat menciptakan rasa aman disekolah.
- f. Kepala sekolah pada hakekatnya adalah sumber semangat bagi para guru, staf, dan siswa. Oleh sebab itu kepala sekolah harus selalu membangkitkan semangat para guru, staf, dan siswa.
- g. Setiap orang dalam kehidupan organisasi baik secara pribadi maupun kelompok, kebutuhannya diperhatikan dan dipenuhi. Penghargaan dan pengakuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan pangkat, fasilitas, kesempatan mengikuti pendidikan dan sebagainya.¹¹

d. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Menurut Mulyasa, dalam bukunya “Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah” menyatakan bahwa: Dalam tingkatan sekolah, Kepala Sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Faktor penting yang besar pengaruh terhadap mutu pendidikan adalah kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah merupakan pimpinan tunggal disekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk

¹¹ Wahyjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 106.

mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah.¹² Sedangkan menurut Nurkolis, dalam bukunya “Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi” menyatakan bahwa: kepala Sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum dan keputusan personel, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan program. Maka peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain, sebagai berikut:

a) Sebagai edukator

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. “menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti *team teaching*, *moving class*, dan mengadakan program akselerasi (*acceleration*) bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.¹³

¹² Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 181.

¹³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 99.

Sebagai seorang pendidik kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan empat macam nilai yaitu:

- 1) Mental
- 2) Moral
- 3) Fisik
- 4) Artistik

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai educator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Mengikut sertakan guru-guru dalam peraturan-peraturan untuk menambah wawasan para guru.
- b) Kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan dipapan pengumuman.
- c) Menggunakan waktu belajar secara efektif disekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengahiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai educator harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan non guru, membimbing peserta didik, mengembangkan tenaga

¹⁴ Ibid., 123-124.

kependidikan, mengikuti perkembangan iptek dan memberikan contoh mengajar.

b) Sebagai manajer

Menejemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “dikatakan suatu proses, karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang paling berkaitan untuk mencapai tujuan.¹⁵

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik yang diwujudkan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan menyusun program secara sistematis, periodik dan kemampuan melaksanakan program yang di buatnya secara skala prioritas.
- 2) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada.
- 3) Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis, dalam kegiatan rutin an temporer.¹⁶

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai manajer harus dapat mengantisipasi perubahan,

¹⁵ Ibid., 103.

¹⁶ Marno, *Islam by Management and Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), 62.

memahami dan mengatasi situasi, mengakomodasi dan mengadakan orientasi kembali.

c) Sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumen seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana prasarana, mengelola administrasi kearsipan dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu di lakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah.¹⁷

d) Sebagai supervisor

Supervise adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervise dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervise mencakup penentuan kondisi atau syarat personil maupun materiil yang diperlukan

¹⁷ Mulyasa, Menjadi kepala Sekolah., 107.

untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu.¹⁸

e) Sebagai *leader*

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.

Wahdjo Sumidjo mengemukakan bahwa “kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan administrasi dan pengawasan”.¹⁹

Adapun tugas kepala sekolah sebagai leader adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kepribadian yang kuat. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, memelihara norma agama dengan baik, jujur, percaya diri, dapat berkomunikasi dengan baik, tidak egois, bertindak dengan objektif, penuh optimis, bertanggung jawab demi kemajuan dan perkembangan, berjiwa besar dan mendelegasikan sebagai tugas dan wewenang kepada orang lain.
- 2) Memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lain.
- 3) Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawannya.
- 4) Mau mendengar kritik, usulan, saran yang konstruktif dan semua pihak yang terkait dengan tugasnya baik dari staf, karyawan atau siswanya sendiri.

¹⁸ Purwanto, *Administrasi dan Supervisi.*, 76.

¹⁹ Wahyjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah.*, 110.

- 5) Memiliki visi dan misi tersebut disampaikan dalam pertemuan individual atau kelompok.
- 6) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti, teratur dan sistematis kepada semua pihak.
- 7) Kemampuan mengambil keputusan bersama secara musyawarah
- 8) Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, membagi tugas secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak.²⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah leader dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan strategi yang tepat, sesuai dengan kematangan para tenaga kependidikan, dan kombinasi yang tepat diantara perilaku tugas dan perilaku hubungan.

f) Sebagai inovator

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.

Adapun tugas kepala sekolah sebagai inovator adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki gagasan baru (proaktif) untuk inovasi kemajuan dan perkembangan madrasah. Maupun memilih yang relevan untuk lembaganya.

²⁰ Marno dan Supriyatno, *Islam By Management And Leadership.*, 39.

- 2) Kemampuan mengimplementasikan ide baru tersebut dengan baik. Ide atau gagasan tersebut berdampak positif kearah kemajuan. Gagasan tersebut dapat berupa pengembangan kegiatan KBM, peningkatan perolehan NEM, penggalian dan operasional, peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.
- 3) Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif (pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaan, halaman, interior, mushola atau masjid) untuk bertugas dengan baik. Dengan lingkungan kerja yang baik mendorong ke arah semangat kerja yang baik. Lebih kondusif untuk belajar bagi siswa dan kondusif bagi guru/karyawan. Jadilah lingkungan yang mendukung dalam arti fisika maupun sosial psikologis.²¹

Jadi dalam melaksanakan serta menjalankan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah.

- g) Sebagai motivator, maka Kepala Sekolah harus selalu memberikan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan.²²

Dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Kepala Sekolah Profesional” karangan Mulyasa, menyatakan bahwa: “kepala sekolah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas disekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan atau kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal.”²³

²¹ Ibid., 64-65.

²² Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2003), 119-121.

²³ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 187.

Menurut Nur Zazin dalam buku “Gerakan Menata Mutu Pendidikan” ada beberapa komponen kepala sekolah sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kepribadian yang kuat (jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa besar).
2. Kemampuan mengawal anak buah (guru, karyawan, atau staf TU).
3. Pemahaman terhadap visi dan misi sekolah, sekaligus dapat merealisasikan.
4. Kemampuan mengambil keputusan yang terampil (cepat, tepat, dan cekat).
5. Kemampuan berkomunikasi (lisan, tulisan).²⁴

Selain komponen di atas, dalam buku “Administrasi dan Supervisi Pendidikan” Herabudin menyatakan bahwa: “Jiwa kepemimpinan kepala sekolah dipertaruhkan dalam proses pembinaan para guru, pegawai tata usaha dan pegawai sekolah lainnya.”²⁵ Dan di dalam bukunya “Administrasi dan Supervisi Pendidikan” Ngalm Purwanto, menyatakan bahwa: “kepala sekolah sebagai supervisor ini merupakan sebuah aktivitas menentukan kondisi/syarat-syarat yang essensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.”²⁶ Dari situ bisa dipahami bahwa kepala sekolah hendaknya pandai meneliti, menari, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan disekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai.

²⁴ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 214.

²⁵ Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 200-201.

²⁶ Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 115.

Dalam bukunya Mulyasa juga menyatakan, sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran disekolah sangat dipengaruhi oleh kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah (*who is behind the school*). Kemampuan kepala sekolah tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepada mereka, karena tidak jarang kegagalan pendidikan dan pembelajaran di sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misinya terletak bagaimana manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam menggerakkan dan memberdayakan dalam berbagai komponen sekolah.²⁷

Sedangkan dalam bukunya “Administrasi dan Supervisi Pendidikan” Herabudin menyatakan bahwa: mutu pendidikan sebagai salah satu indikator untuk melihat produktivitas dan erat hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada lembaga atau sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan sebuah pernyataan “kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen.” Salah satu mengatasi permasalahan

²⁷ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 5.

mutu adalah dengan mempelajari kecerdasan emosional yang diterapkan kepala sekolah sebagai pengelola.²⁸

2. Tinjauan Tentang Mutu Pendidikan.

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Edward Sallis mengartikan Mutu pendidikan adalah “sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan”.²⁹

Menurut Djauzak Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Sriminarti menjelaskan bahwa: “Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku”.³⁰

Menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009, mengartikan mutu pendidikan adalah “tingkat kecerdasan kehidupan bangsa dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional”.³¹

Menurut Rohiat, mengartikan mutu pendidikan adalah “gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan

²⁸ Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Ibid., 19.

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Ter-Ahmad Ali Riyadi, (Jogjakarta: Ircisod, 2010), 33.

³⁰ Sriminarti, *Manajemen Sekolah*, (Jogjakarta: Arruz-Media, 2011), 328.

³¹ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 129.

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan, mencakup *input*, *proses*, dan *output* pendidikan”.³²

Penulis menyimpulkan bahwa pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Dan didalam peningkatan mutu pendidikan prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis dan non akademis. Dalam mutu pendidikan itu sendiri, mencakup *input*, *proses* dan *output* pendidikan. *Input* pendidikan yang dimaksud disini adalah segala hal yang harus tersedia karena kebutuhan untuk berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, Bp, karyawan, siswa, dan lain-lain). Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Output sekolah dikatakan berkualitas tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik dan non akademik.

Menurut Edward Sallis dalam bukunya “*Total Quality Management In Education*” bahwa mutu, khususnya dalam konteks *Total Quality Management* (TQM) adalah hal yang berbeda. TQM adalah alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Dalam dunia industri barat, TQM adalah cara yang menghilangkan tekanan ekonomi sehingga mereka mampu bersaing lebih baik dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi dikawasan Pasifik. Ada beberapa pihak yang percaya bahwa

³² Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 52.

TQM dapat diaplikasikan dalam pendidikan. Bagaimanapun juga, TMQ tidak akan membawa hasil dalam waktu yang singkat. Esensi TQM adalah perubahan budaya (*change of culture*). Perubahan budaya sebuah institusi adalah sebuah proses yang lambat, dan tidak bisa tergesa-gesa. Dampak-dampak TQM hanya akan dicapai jika semua pelakunya merasa perlu untuk ikut terlibat. Makna sejati dari mutu tersebut harus mampu menyentuh pikiran dan hati semua pelaku. Dan dalam dunia pendidikan, hal ini akan terwujud jika semua staf pendidikan merasa yakin bahwa pengembangan mutu akan membawa dampak positif bagi mereka dan akan menguntungkan para anak didik.³³

Dalam buku “Qualities Of Effective Principals” karangan James H. Stronge, Holli B. Ricard, Nancy Catano, bahwa ada delapan elemen kualitas kepala sekolah yang efektif:

1. Quality 1: Instructional Leadership
The principal fosters the success of all students by facilitating the development, communication, implementation, and evaluation of a shared vision of learning that reflects excellence.
2. Quality 2: School Climate
The principal fosters the success of all students by advocating, nurturing, and sustaining a positive and safe school climate for all stakeholders.
3. Quality 3: Human Resource Administration
The principal fosters effective human resources administration through the selection, induction, support, and retention of quality instructional and support personnel.
4. Quality 4: Teacher Evaluation
The principal conducts meaningful, timely, and productive evaluations of teachers and other staff members in order to support ongoing performance effectiveness and school improvement.

³³ Edward Sallis, *Total Quality*, 34

5. Quality 5: Organizational Management
The principal fosters the success of all students by supporting, managing, and overseeing the school's organization, operation, and resources.
6. Quality 6: Communication and Community Relations
The principal fosters the success of all students by collaborating effectively with all stakeholders.
7. Quality 7: Professionalism
The principal fosters the success of all students by demonstrating integrity, fairness, and ethical behavior.
8. Quality 8: The Principal's Role in Student Achievement
The principal's leadership results in acceptable, measurable progress based on established standards.³⁴

Dari pendapat diatas bahwa kedelapan elemen tersebut adalah Instruksional Kepemimpinan Kepala sekolah itu mendorong keberhasilan semua siswa dengan memfasilitasi pengembangan, komunikasi, pelaksanaan, dan evaluasi visi bersama pembelajaran yang mencerminkan keunggulan. Sekolah Iklim itu Kepala sekolah mendorong keberhasilan semua siswa dengan advokasi, memelihara, dan mempertahankan iklim sekolah yang positif dan aman untuk semua pemangku kepentingan. Administrasi Sumber Daya Manusia, Kepala sekolah mendorong administrasi sumber daya manusia yang efektif melalui seleksi, induksi, dukungan, dan retensi kualitas instruksional dan dukungan personil. Evaluasi Guru, Kepala sekolah melakukan bermakna, tepat waktu, dan produktif evaluasi guru dan anggota staf lain dalam rangka mendukung efektivitas kinerja berkelanjutan dan perbaikan sekolah. Manajemen Organisasi, Kepala sekolah mendorong keberhasilan semua siswa dengan mendukung, mengelola, dan

³⁴ James H. Stronge, Holly B. Rhicard, Nancy Catano, *Qualities Of Effective Principals* (America: Association for Supervision and Curriculum Development, 2008), 13.

mengawasi organisasi sekolah, operasi, dan sumber daya. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala sekolah mendorong keberhasilan semua siswa dengan berkolaborasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan. Profesionalisme, Kepala sekolah mendorong keberhasilan semua siswa dengan menunjukkan integritas, keadilan, dan perilaku etis. Kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa, kepemimpinan kepala sekolah berakibat diterimanya dan terukurnya suatu kemajuan berdasarkan standar yang telah di tentukan.

b. Indikator Mutu Pendidikan

Menurut Sri Minarti, indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil ahir pendidikan.
- b. Hasil langsung pendidikan. Hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- c. Proses pendidikan.
- d. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan *raw input* (siswa), seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar, membangun kinerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.
- e. *Raw input* dan lingkungan, yaitu siswa, dukungan orang tua yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak dirumah maupun di sekolah.³⁵

³⁵ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah.*, 335-336.

Penulis menyimpulkan, dalam dunia pendidikan pasti tidak lepas dengan adanya indikator atau suatu yang menjadi tolak ukur, yang mana dengan adanya tolak ukur maka dapat dinilai apakah pendidikan tersebut bermutu ataukah hanya sekedar menjalankan pendidikan tanpa adanya tolak ukur yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk melihat apakah indikator dalam pembelajaran tercapai secara maksimal, maka dapat dilihat melalui hasil ahir, hasil langsung pendidikan. Dengan melihat hasil ahir ataukah hasil langsung pendidikan, maka akan terlihat apakah pendidikan tersebut telah tercapai sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh sekolah.

c. Prinsip-prinsip Mutu pendidikan

Menurut Hensler dan Brunell sebagaimana yang dikutip oleh Husaini Usman terdapat empat prinsip dalam mutu pendidikan adalah:

- a. Kepuasan Pelanggan (peserta didik)
Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pendidikan adalah pelayanan jasa. Sekolah harus memberikan pelayanan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggannya. Pelanggan sekolah meliputi pelanggan internal dan eksternal sekolah. Pelanggan eksternal sekolah adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat dan termasuk komite sekolah. Pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru, dan staf tata usaha.
- b. Respek terhadap setiap orang
Dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang disekolah dipandang memiliki potensi. Orang yang ada diorganisasi dipandang sebagai sumberdaya organisasi yang paling bernilai dan dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karena itu, setiap orang diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berkarier, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Manajemen berdasarkan fakta

Sekolah kelas dunia berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu di dasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (*feeling*) atau ingatan semata. Ada dua konsep yang berkaitan dengan hal ini: pertama, prioritasasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan menggunakan data, manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu. Kedua, variasi atau variabelitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai *variabilitas* yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi.

d. Perbaikan terus-menerus

Agar dapat sukses setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku adalah siklus PDCA, yang terdiri dari langkah perencanaan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil pelaksanaan rencana, dan melakukan tindakan *korektif* terhadap hasil yang diperoleh.³⁶

Penulis menyimpulkan bahwa dalam prinsip mutu pendidikan, suatu lembaga yang menginginkan memiliki sekolahan yang bermutu dan berkualitas sangat perlu adanya perbaikan secara terus menerus yang mana didalamnya terdapat kepuasan pelanggan, disini pelanggan meliputi antara pelanggan *eksternal* dan *internal*, pelanggan eksternal adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah. Pelanggan internal adalah siswa, guru dan staf tata usaha. Serta rasa respek terhadap setiap orang dengan memperlakukan orang lain yang dipandang memiliki potensi dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berprestasi, berkarier, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

³⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 535-536.

d. Komponen-komponen Mutu Pendidikan

Menurut West-Bumham sebagaimana yang di kutip oleh Husaini Usman menyatakan bahwa komponen-komponen mutu pendidikan ada empat yaitu:

- a. Prinsip-prinsip
Hal-hal yang harus dilakukan warga sekolah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan policy sekolah. Dalam hal ini peranan kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan.
- b. Proses
Upaya-upaya yang dilakukan warga sekolah untuk memuaskan pelanggannya.
- c. Pencegahan
Upaya sekolah untuk menghindari kesalahan sejak awal, pencegahan lebih baik dari pada perbaikan harus menjadi filosofi warga sekolah.
- d. Manusia
Warga sekolah yang bekerja secara sinergi dalam suatu manajemen *kolegial* serta lebih menekankan pada pentingnya hubungan manusiawi.³⁷

Menurut Sallis yang dikutip oleh Husaini Usman, menyatakan bahwa kerangka komponen-komponen mutu meliputi:

- a. Kepemimpinan dan strategi meliputi komitmen, kebijakan mutu, analisis organisasional, misi dan rencana strategi, serta kepemimpinan.
- b. Sistem dan prosedur meliputi administratif, pemaknaan data dan biaya mutu.
- c. Kerja tim, meliputi pemberdayaan, memenej diri sendiri, kelompok, alat mutu yang digunakan.
- d. Asesmen diri sendiri, meliputi asesmen sendiri, monitoring dan evaluasi survei kebutuhan pelanggan, dan pengujian standar.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa, semua kegiatan yang dilakukan berfokus kepada peserta didik (siswa) antara komponen yang satu dengan

³⁷ Ibid., 539.

³⁸ Ibid., 540.

komponen berikutnya saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan, pertanggung jawaban, dan pihak-pihak yang peduli dan pelanggan, adapun pelanggan disini meliputi pelanggan *eksternal* sekolah adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah. Pelanggan *internal* sekolah adalah siswa, guru dan staf tata usaha.

e. Ciri-ciri Sekolah Bermutu

Mutu itu relatif ukurannya adalah terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan pengguna. Mutu juga dapat dilihat dari kapasitas atau daya tera hasil karya atau perolehan belajar. Mutu sering kali juga tidak menggambarkan sosok institusi secara keseluruhan. Menurut Edward Sallis yang dikutip oleh Sudarwan danim, memaparkan dan memberikan gambaran mengenai ciri-ciri sekolah yang bermutu:

- a. Berfokus pada pelanggan, baik pelanggan *internal* maupun *eksternal*. Pada sekolah yang bermutu totalitas perilaku staff, tenaga akademik, dan pimpinan melakukan tugas pokok dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Inisiatif ini perlu di dukung oleh *mekanisme* kerja secara vertikal dan horizontal dengan menempatkan kepentingan akademik sebagai inti kegiatan. Pelanggan jasa pendidikan umumnya dan sekolah khususnya adalah semua pihak yang memerlukan, terlibat didalam, dan berkepentingan terhadap jasa pendidikan itu. Pelanggan sekolah terdiri dari tiga komponen utama: pelanggan *primer* antara lain; siswa atau pihak-pihak yang menerima jasa pendidikan secara langsung. Pelanggan *sekunder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mutu jasa pendidikan, antara lain, orang tua, instansi, penyandang dana atau beasiswa siswa, pemerintah yang menanggung biaya pendidikan, tenaga akademik, tenaga administratif sekolah, pelanggan *tersier* adalah pelanggan yang tidak terkait langsung dengan jasa pendidikan tetapi berkepentingan terhadap mutu

- jasa layanan kependidikan itu, karena mereka memanfaatkan hasil jasa layanan. Termasuk dalam kategori pelanggan *tersier* ini adalah masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- b. Berfokus pada upaya untuk mencegah masalah-masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
 - c. Memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga *administratif*.
 - d. Memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, menengah, panjang.
 - e. Mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
 - f. Mendorong orang yang di pandang memiliki kreativitas dan mampu menciptakan kualitas, serta merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
 - g. Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
 - h. Memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
 - i. Memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
 - j. Memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
 - k. Menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.³⁹

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya pengembangan sekolah yang bermutu merupakan upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian peserta didik (siswa), dan juga dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang sama-sama memiliki kualitas tinggi dibidang pendidikan dan mampu bersaing menghadapi era yang semakin modern.

Dengan demikian hadirnya sekolah atau madrasah yang bermutu memiliki nilai yang sangat besar bagi masyarakat dalam menyongsong era global yang semakin meningkat dan terus berkembang. Manandai suatu lembaga yang bermutu perlu adanya pembuktian melalui produk

³⁹ Sudarwan Danim, *Otonomi Manajemen Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 146-148.

yang dihasilkannya. Berbicara efektivitas sekolah tidak dapat dipisahkan dengan mutu sekolah, dan mutu sekolah adalah mutu semua komponen yang ada di dalam sistem pendidikan.

f. Standart Mutu Pendidikan

Di dalam PP 19 tahun 2005 yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra, disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standart yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan, Standart Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰ Sekolah sebagai organisasi, dalam memperbaiki kualitas, tidak dapat memperhatikan satu aspek saja, tetapi harus melihat seluruh aspek yang ada disekolah, dan mutu pendidikan yang baik itu harus memenuhi delapan Standart Nasional Pendidikan, lingkup Standart Nasional Pendidikan meliputi:

- a. Standart isi;
- b. Standart proses;
- c. Standart kompetensi lulusan;
- d. Standart pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standart sarana dan prasarana;
- f. Standart pengelolaan;
- g. Standart pembiayaan; dan
- h. Standart penilaian pendidikan.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 280-281.

⁴¹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Standart Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁴²

Dari kedelapan lingkup Standart Nasional Pendidikan di atas yaitu:

1. Standar isi

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.⁴³

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Dan standar isi disusun tentu saja sesuai dengan SKL (Standar Kompetensi Kelulusan).⁴⁴

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar isi pasal 5, yaitu:

⁴² Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan.*, 282.

⁴³ *Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁴⁴ Dedi Mulayana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 150.

- 1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.⁴⁵

2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, hal ini disebut dengan sumber daya manusia.⁴⁶

Berdasarkan buku “Manajemen Pendidikan” yang di terbitkan Pustaka Setia, karangan Hikmat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah: “manajemen yang di fokuskan pada peningkatan personal dalam organisasi, di antaranya memberikan pelatihan dan pendidikan agar siswa menguasai teknik-teknik belajar dan pelaksanaan kegiatannya, dan penghargaan terhadap prestasinya.”⁴⁷

Keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia ditempat

⁴⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.*,

⁴⁶ *Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁴⁷ Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 39.

kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern.⁴⁸

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendaya gunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen tenaga kependidikan tersebut mencakup 1) perencanaan pegawai, 2) pengadaan pegawai, 3) pembinaan dan pengembangan pegawai, 4) promosi dan mutasi, 5) pemberhentian pegawai, 6) kompensasi, dan 7) penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.⁴⁹

Sedangkan tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Karena itu kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar urut pengangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat

⁴⁸ Muhammad Surya, *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 121.

⁴⁹ Agus Dharma, *Manajemen Berbasis Sekolah* (agus_dwilly@yahoo.com), di akses pada tanggal 8 April 2015.

pekerjaan, dan kondite pegawai untuk membantu kelancaran program sekolah yang dipimpinnya.⁵⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 dan pasal 36, pada pasal 28 yaitu:

- 1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial
- 4) Seorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana di maksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- 5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) di kembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.⁵¹

Pasal 36 yaitu:

- 1) Tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Ibid.,

2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.⁵²

Upaya bangsa Indonesia dalam mengembangkan sumber daya manusia tersebut juga dapat dilihat dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS), yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.⁵³

Mengingat betapa sentralnya peran pendidikan yang merupakan salah satu cara atau sarana untuk mencapai suatu harapan yang di inginkan dengan melalui dunia pendidikan, maka sudah sepatutnya kita perhatikan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan.

3. Standar Sarana dan Prasarana

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk

⁵² Ibid.,

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media, 2010.

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁵⁴

Menurut Depdiknas yang dikutip oleh Barnawi dan M. Arifin dalam buku “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah” telah membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah. Berkaitan dengan ini, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.⁵⁵ Dari pengertian tersebut dapat di ambil titik penekananya yaitu bahwa pada sifatnya sarana itu bersifat langsung, dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisi, dan penghapusan serta penataan. Oleh karena itu dengan adanya manajemen sarana dan prasarana yang baik, diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan

⁵⁴ *Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁵⁵ Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2012), 47-48.

kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid yang berada disekolah.

Menurut Husaini Usman dalam buku “Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan” menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin di capai berhasil, maka harus melakukan koordinasi yang terkait dengan koordinasi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1. Kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana untuk pengadaan, penyimpana, dan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah untuk kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.
2. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana berkoordinasi dengan kepala bagian perlengkapan Dinas Pendidikan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
3. Untuk memperlancar proses pengadaan semua kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, maka kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta kepala bagian perlengkapan, kepala seksi keuangan sekolah, dan kepala bagian keuangan dinas mengadakan koordinasi.⁵⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 19 tahun 2005 tentang standar sarana dan prasarana pasal 42, yaitu:

- 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain,

⁵⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 417.

tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁵⁷

4. Standar Proses

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.⁵⁸

Proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan di selenggarakan secara interaktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁵⁹

Berdasarkan buku “Manajemen Pendidikan” yang di terbitkan Pustaka Setia, karangan Hikmat yang menyatakan: “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.”⁶⁰

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai bisa maksimal, berdasarkan buku “Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan” yang di terbitkan Bumi Aksara, karangan Husaini Usman memaparkan terkait dengan komponen-komponen koordinasi proses

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.,

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁵⁹ Dedi Mulayana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.*, 155.

⁶⁰ Hikmat, *Manajemen Pendidikan.*, 106.

belajar mengajar untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah, pengawas sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum bersama-sama membuat program kegiatan supervisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lengkap dengan administrasi yang rinci, pembagian tugas harus jelas.
2. Usahakan adanya koordinasi dengan kepala sekolah misalnya kebenaran dan ketelitian dalam penerimaan dan kelulusan siswa.⁶¹

Kepala sekolah setiap bulan mengadakan pertemuan misalnya pertemuan staff, kepala sekolah, BP3 dan pengawas untuk membahas upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kepala sekolah berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan setiap tahun. Laporan di buat tertulis tentang jumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, siswa yang diterimanya, dan siswa yang lulus.⁶² Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 19 tahun 2005 tentang standar proses pasal 19, yaitu:

- 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidikan memberikan keteladanan.
- 3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

⁶¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 417.

⁶² *Ibid.*, 418.

untuk terlaksanannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.⁶³

Dari situ manajemen kurikulum dan program pengajaran juga merupakan bagian dari proses pembelajaran, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.⁶⁴

Kurikulum muatan lokal pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang berbunyi, “ pelaksanaan kegiatan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang di sesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan.” Sebagai tindak lanjut hal tersebut, muatan lokal telah dijadikan strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan

⁶³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.*,

⁶⁴ M. Zainudin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 36.

kebutuhan lokal dan sejauh mungkin dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.⁶⁵

Kepala sekolah sebagai seorang manajer disekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Selain itu ia harus dapat bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah.⁶⁶

5. Standar Kompetensi Lulusan (*output*)

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁶⁷ Standar kompetensi lulusan digunakan untuk pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.⁶⁸

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat di ukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 71.

⁶⁷ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁶⁸ Dedi Mulayazana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.*, 156.

kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan kualitas atau mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik berupa nilai ulangan harian, nilai dari portofolio, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, UAN/UAS, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik. Prestasi non akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejujuran dan sebagainya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶⁹

Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah adalah peserta didik harus dapat belajar secara optimal. Proses belajar harus menjadi perhatian utama kepala sekolah, dan segala fasilitas yang ada harus di arahkan pada kegiatan belajar peserta didik, karena melalui proses belajar yang optimal paling tidak peserta didik sudah dapat diberi layanan prima.⁷⁰ karena apa yang diperkuat oleh pemimpin tidak akan dilihat prestasinya, melainkan akan dilihat hasilnya. Bila hasilnya sesuai dengan rencana dan harapan berarti pemimpin tersebut berhasil dalam tugasnya

⁶⁹ Rohiat, *Manajemen Sekolah.*, 53.

⁷⁰ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 83.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 19 tahun 2005 tentang standart kompetensi lulusan pasal 25 , yaitu:

- 1) Standart kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penelitian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- 2) Standart kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- 3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁷¹

6. Standar pengelolaan

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.⁷²

Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.⁷³

⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.,

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁷³ Dedi Mulayasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.*, 164.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar pengelolaan pasal 49, yaitu:

- 1) pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.⁷⁴

7. Standar pembiayaan

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.⁷⁵

Pembiayaan pendidikan terdiri atas *biaya investasi* satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana-dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasi pendidikan, standar

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.,

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.⁷⁶

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar pembiayaan pasal 62, yaitu:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.⁷⁷

1. Standar penilaian pendidikan

Dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.⁷⁸

⁷⁶ Dedi Mulayana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.*, 170.

⁷⁷ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.*,

⁷⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.⁷⁹

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar penilaian pendidikan pasal 63, yaitu:

- 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- 2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- 3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Dari uraian tersebut di atas dapat di tekankan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan ruang lingkupnya itu sangat luas, sebab meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan tuntutan yang ada.

⁷⁹ Dedi Mulayana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.*, 170-171.

⁸⁰ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.*